

Model Akuntabilitas Kewirausahaan Lokal dan Pengukuran Aset Tak Berwujud (KI) dalam Mendorong Ekonomi Kreatif dan Digital di Kabupaten Kolaka

Zulkifli¹, Andi Musyarrafah Vetriyani², Hilda Novitasari³

^{1,2,3} Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Indonesia

e-mail: zulkifli@poliupg.ac.id

Abstrak

Kabupaten Kolaka, dengan basis sumber daya alam yang kuat (nikel, kakao, dan pariwisata bahari), dihadapkan pada tantangan untuk mendiversifikasi ekonominya melalui pengembangan sektor Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan Ekonomi Digital (Ekdig). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kewirausahaan lokal sebagai katalisator, dan mengkaji model akuntabilitas yang tepat untuk mengukur serta melaporkan nilai aset tak berwujud seperti Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari produk Ekraf Kolaka. Metode penelitian kualitatif-eksploratif dengan studi kasus di Kolaka digunakan untuk menganalisis dokumen kebijakan, laporan program pelatihan HKI, dan inisiatif digital lokal (misalnya, aplikasi bank sampah digital "Nampah"). Temuan menunjukkan model akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah dan mitra cenderung menekankan compliance, sementara UMKM kesulitan mengakses permodalan karena HKI yang dimiliki tidak dapat diukur nilainya sesuai standar akuntansi tradisional. Penelitian ini menyajikan kerangka akuntansi kewirausahaan yang mengintegrasikan pengukuran nilai KI dan model kolaborasi jaringan (Alliance Network Provan & Kenis, 2008) yang lebih adaptif untuk memperkuat daya saing produk unggulan Kolaka di pasar digital.

Kata kunci: Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Digital, Akuntabilitas, Kekayaan Intelektual.

PENDAHULUAN

Kolaka dikenal sebagai salah satu lumbung komoditas utama di Sulawesi Tenggara, dengan sektor pertambangan nikel dan perkebunan kakao menjadi tulang punggung ekonomi (Basri & Rahmat, 2023). Namun, paradigma pembangunan modern menuntut pergeseran menuju ekonomi yang berbasis nilai (value-driven), yaitu melalui Kewirausahaan di sektor Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital (Florida, 2002). Pemerintah daerah, melalui inisiatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Dekranasda, telah mengarahkan fokus pada pengembangan kerajinan tangan, produk olahan, dan desa wisata (seperti Sungai Tamborasi dan Wisata Tanjung Malaha).

Perkembangan ini memunculkan pertanyaan kritis bagi disiplin akuntansi:

1. Bagaimana akuntabilitas program pengembangan kewirausahaan dan Ekraf dapat diukur secara efektif, tidak hanya dari sisi input tetapi juga outcome?
2. Bagaimana aset tak berwujud yang dihasilkan (merek, hak cipta) diakui dan diukur nilainya oleh pelaku UMKM di Kolaka untuk menarik permodalan?

Penelitian ini berargumen bahwa untuk mencapai pertumbuhan Ekraf dan Ekdig yang berkelanjutan, diperlukan penyempurnaan model akuntabilitas yang melampaui pelaporan keuangan tradisional, mencakup pengukuran aset KI, dan penguatan kolaborasi dalam ekosistem digital (Novela & Runin, 2024). Fokus pada Kewirausahaan di daerah berkembang seperti Kolaka sangat penting mengingat potensi lokal yang belum terjamah sepenuhnya oleh digitalisasi

(Gómez-Perales & Rivas-Tovar, 2022; Puspitasari & Setianto, 2023).

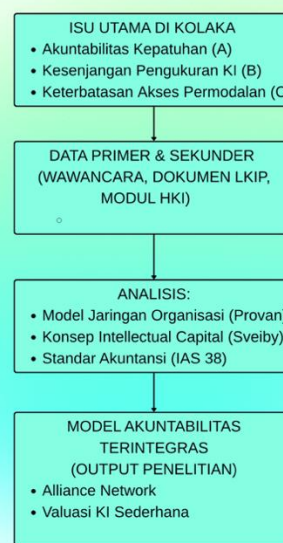
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kabupaten Kolaka (Yin, 2018). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena akuntabilitas jaringan dan proses pengukuran aset tak berwujud dalam konteks kewirausahaan lokal. Tujuan Studi Kasus ini Adalah untuk mengeksplorasi secara holistik implementasi program Ekraf dan praktik akuntansi aset tak berwujud di kalangan UMKM serta lembaga terkait di Kolaka.

Model penelitian ini memvisualisasikan kerangka konseptual yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara isu akuntabilitas (A), tantangan pengukuran KI (B), dan potensi penguatan ekonomi digital (C). Model ini menjadi panduan dalam pengumpulan dan analisis data lapangan.

KERANGKA KONSEPTUAL

Secara singkat, kerangka konseptual ini menggambarkan bagaimana masalah utama di Kolaka (terkait akuntabilitas, pengukuran Kekayaan Intelektual, dan permodalan) dianalisis secara teoritis menggunakan tiga pendekatan (Model Jaringan, Konsep IC, dan Standar Akuntansi).



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian
(sumber: diolah menggunakan <https://mermaid.live>)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Kabupaten Kolaka. Data yang digunakan merupakan Data Primer melalui Wawancara mendalam (Indepth Interview) dengan 5 Pelaku UMKM Ekraf (olahan makanan) di Kolaka. UMKM yang menjadi sampel wawancara dalam penelitian ini merupakan lima pelaku usaha penerima bantuan dana dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka, yang dipilih karena keterlibatan mereka secara langsung dalam program pengembangan ekonomi kreatif dan pemberdayaan wirausaha lokal. Data Sekunder melalui Analisis dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kolaka terkait Ekraf, modul pelatihan HKI, dan publikasi resmi mengenai investasi dan potensi daerah (Bappenas, 2022).

Fokus Analisis dalam penelitian ini adalah Efektivitas implementasi pelatihan HKI dan dampaknya terhadap kesadaran akuntansi aset tak berwujud (Atikah et al., 2022). Kesesuaian model Akuntabilitas Kinerja program pemerintah (Setiawan & Wibowo, 2020) dengan kebutuhan inovasi kewirausahaan (Chen & Hsieh, 2024). Analisis dampak platform digital dalam mendukung pemasaran dan operasional UMKM (Novela & Runin, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan 1: Akuntabilitas Kepatuhan vs. Kinerja dalam Jaringan Kolaborasi Penelitian

mengidentifikasi empat aktor kunci dalam ekosistem Ekraf Kolaka: Pemerintah Daerah (Dinas terkait), Korporasi (melalui program CSR), UMKM Ekraf, dan Komunitas Digital. Ditemukan bahwa model kolaborasi yang ada menyerupai *Shared-Governance Network* (Provan & Kenis, 2008), namun pengukuran akuntabilitas program Ekraf oleh Pemerintah dan Korporasi dominan terfokus pada kepatuhan administrasi (penyerapan anggaran, jumlah pelatihan) daripada kinerja dampak (peningkatan omzet, valuasi KI).

Temuan 2: Kesenjangan Pengakuan dan Pengukuran Nilai Kekayaan Intelektual (KI) Sebanyak 80% UMKM yang diwawancarai telah mengikuti pelatihan HKI dan memiliki dokumen legalitas (Merek atau Hak Cipta) untuk produk mereka. Namun, 95% masih menggunakan pencatatan keuangan sederhana dan menganggap biaya pengurusan HKI sebagai biaya legalitas, bukan aset yang diukur nilainya. Ini sejalan dengan temuan bahwa standar akuntansi UMKM di Indonesia cenderung mengabaikan pengakuan aset tak berwujud yang dihasilkan sendiri, sesuai tantangan yang diuraikan oleh IAS 38 (IAS 38, 2023).

Temuan 3: Keterbatasan Akses Permodalan Berbasis KI Ditemukan adanya kesenjangan (gap) besar antara kebutuhan pembiayaan UMKM Ekraf dengan produk pinjaman yang ditawarkan lembaga keuangan. Lembaga keuangan konvensional di Kolaka masih sangat menuntut aset berwujud sebagai jaminan. Akibatnya, aset KI (Merek terdaftar) yang menjadi sumber nilai utama produk kreatif tidak dapat dijadikan jaminan karena tidak adanya standar valuasi akuntansi yang diakui secara lokal yang mampu mengubah nilai potensi KI menjadi nilai buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Ekosistem Ekraf Kolaka memiliki potensi yang didukung oleh kolaborasi jaringan dan kesadaran HKI yang cukup baik, akuntabilitas dan mekanisme pembiayaan belum sepenuhnya beradaptasi dengan karakter ekonomi berbasis nilai (KI).

Model akuntabilitas yang terlalu menekankan kepatuhan (Setiawan & Wibowo, 2020) gagal menangkap dampak transformatif dari inovasi kewirausahaan. Dalam konteks jaringan Kolaka, akuntabilitas harus bergeser dari pelaporan individu (Dinas A atau Korporasi B) menjadi akuntabilitas hasil kolektif, sebagaimana ditekankan oleh Chen & Hsieh (2024). Peta aktor yang ditemukan (Temuan 1) memerlukan model jaringan yang lebih adaptif, seperti Alliance Network (Provan & Kenis, 2008). Alliance Network lebih optimal karena fokus pada pencapaian tujuan kolektif (outcome Ekdig), membutuhkan kontrol manajerial yang terpusat, dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih terarah untuk program berbasis KI (seperti pemasaran digital terpusat) dibandingkan Shared-Governance yang hanya menekankan koordinasi antar-anggota yang sederajat.

Kesenjangan pengakuan KI (Temuan 2) menghambat UMKM dalam merealisasikan nilai aset mereka. Mengacu pada literatur Intellectual Capital (Sveiby, 1997; Edvinsson & Malone, 1997), penting untuk mengintegrasikan pengukuran KI ke dalam pelaporan sederhana UMKM. Valuasi KI, meskipun menantang (Lev & Zambon, 2022), adalah kunci untuk mengatasi Temuan 3 (keterbatasan akses permodalan). Pengukuran ini harus mencakup dimensi non-finansial, seperti jumlah pelanggan digital, tingkat retensi, dan nilai merek, yang merupakan hasil dari Kewirausahaan Digital (Novela & Runin, 2024).

Untuk mengatasi kendala Temuan 3, diperlukan adopsi pendekatan Valuasi KI berbasis Pendapatan (Income-Based Approach) yang disederhanakan. Metode ini, seperti Multi-period Excess Earnings (MPEEM) yang disesuaikan, dapat digunakan untuk mengestimasi nilai KI (Merek, Hak Cipta) dengan memproyeksikan aliran kas masa depan yang diatribusikan secara spesifik pada aset tak berwujud tersebut. Hal ini menawarkan basis yang lebih kuat bagi Lembaga Keuangan di Kolaka untuk menerima KI sebagai jaminan, karena nilainya dihitung berdasarkan potensi pasar dan keuntungan ekonomi yang dapat dihasilkan oleh aset Ekraf tersebut.

Tabel 1. Model Akuntabilitas Kewirausahaan Lokal Terintegrasi yang Diusulkan

Komponen Akuntabilitas	Dimensi Pengukuran	Indikator Utama (Contoh)	Tujuan (Outcome)	Dasar Referensi
Kepatuhan (<i>Compliance</i>)	Penggunaan Anggaran	Persentase penyerapan dana program Ekraf	Transparansi dan kepatuhan administrasi.	Setiawan & Wibowo (2020)
Kinerja (<i>Performance</i>)	Dampak Ekonomi Lokal	Peningkatan rata-rata omzet UMKM Ekraf (Tahunan)	Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha.	Adhie & Mulyana (2022); Chen & Hsieh (2024)
Nilai Aset Tak Berwujud	Pengukuran Kekayaan Intelektual (KI)	Jumlah HKI yang tersertifikasi (Merek, Hak Cipta) dan nilai valuasi KI.	Peningkatan daya tawar dan akses permodalan UMKM.	Lev & Zambon (2022); Atikah et al. (2022); IAS 38 (2023)
Jaringan (<i>Network</i>)	Efektivitas Kolaborasi	Jumlah Kemitraan Aktif (<i>Alliance</i>) (Pemerintah-Swasta-Komunitas)	Penguatan ekosistem dan jangkauan pasar digital.	Provan & Kenis (2008); Chen & Hsieh (2024)

(sumber: diolah dari berbagai sumber, 2025)

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Ekosistem Kewirausahaan Ekonomi Kreatif dan Digital di Kabupaten Kolaka masih menghadapi tantangan pada dua aspek utama: kelemahan model akuntabilitas yang berorientasi kepatuhan (*compliance*), dan ketidakmampuan UMKM serta lembaga keuangan untuk mengakui dan mengukur nilai Kekayaan Intelektual sebagai aset yang dapat dijamin. Pergeseran ke model akuntabilitas terintegrasi (Tabel 1) yang menyeimbangkan kepatuhan, kinerja, nilai KI, dan efektivitas jaringan (*Alliance Network*) sangat diperlukan untuk membuka potensi pembiayaan berbasis aset tak berwujud dan mendorong pertumbuhan Ekdig yang berkelanjutan.

REFERENSI

- Adhie, L. A., & Mulyana, R. (2022). Innovation and Accountability of Local Government in Creative Economic Development. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2), 195-210. DOI: 10.33005/jiana.v12i2.2859
- Atikah, I., Zaini, A., & Sumirat, I. R. (2022). Intellectual Property Rights as The Resource for Creative Economic in Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 451-464. DOI: 10.30641/dejure.2022.V22.451-464
- Bappenas. (2022). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Bidang Ekonomi Kreatif 2020-2024. Jakarta: Bappenas.
- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120. DOI: 10.1177/014920639101700108
- Basri, Y., & Rahmat, F. (2023). The Role of Mining Sector in Regional Economic Growth of Kolaka Regency. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 24(1), 1-15. DOI: 10.21009/JEP.24.1.1
- Chen, R., & Hsieh, S. (2024). Network Governance and Accountability in Public-Private Partnerships: A Performance Measurement Framework. *Public Administration Review*, 84(1), 50-65. DOI: 10.1111/puar.13788
- Dewi, P. E., & Darma, G. S. (2021). The Impact of Digital Literacy on MSME Performance through E-commerce Adoption. *International Journal of Social Science and Business*, 5(4), 701-712. DOI: 10.23887/ijssb.v5i4.44490

- Edvinsson, L., & Malone, M. S. (1997). *Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower*. Harper Business.
- Florida, R. (2002). The Economic Geography of Talent. *Annals of the Association of American Geographers*, 92(4), 743-755. DOI: 10.1111/1467-8306.00314
- Gómez-Perales, M. C., & Rivas-Tovar, L. A. (2022). Local public-private partnerships to promote innovation in agricultural value chains: the case of cocoa in Colombia. *Revista de Economía e Sociología Rural*, 60(4), e249339. DOI: 10.1590/1806-9479.2022.249339
- IAS 38. (2023). *International Accounting Standard 38: Intangible Assets*. IFRS Foundation.
- Lev, B., & Zambon, S. (2022). Intangibles in the New Economy: Valuation, Measurement, and Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 41(4), 106967. DOI: 10.1016/j.jaccpubpol.2022.106967
- Novela, I., & Runin, H. S. (2024). Digital Literacy on SME Business Performance and The Mediating Role of Entrepreneurial Skills. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi*, 10(3), 847-856. DOI: 10.17358/jabm.10.3.847
- Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(2), 229-252. DOI: 10.1093/jopart/mum017
- Puspitasari, E., & Setianto, R. (2023). Digital Transformation Challenges for MSMEs in Developing Regions: A Case Study in Central Java. *International Journal of Digital Economy*, 4(2), 112-125. DOI: 10.32731/ijde.v4i2.87
- Setiawan, B., & Wibowo, S. (2020). Model Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik untuk Inovasi Daerah Berbasis Ekonomi Kreatif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 115-128. DOI: 10.51897/jkp.v11i2.213
- Sveiby, K. E. (1997). *The New Organizational Wealth: Managing & Measuring Knowledge-Based Assets*. Berrett-Koehler Publishers.
- Tricahyono, D., & Sudrajat, A. I. (2022). The Role of Digital Literacy in Moderating the Relationship between Digital Capabilities and MSME Business Performance. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 19(3), 205-218. DOI: 10.24843/JMB.2022.v19.i03.p05
- UNESCO. (2021). *Creative Economy Report: The Future of Cultural and Creative Industries in the Digital Age*. Paris: UNESCO Publishing.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.